

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR SINARARTA SEJAHTERA
TAHUN 2022**



**JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
TELEPON: (0287) 473388**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola wajib dilaksanakan oleh PT. BPR Sinararta Sejahtera sebagai Bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) pada PT. BPR Sinararta Sejahtera pada tahun 2022 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. PT. BPR Sinararta Sejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (OJK - Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Sinararta Sejahtera dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing industri perbankan khususnya di kota Kebumen.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, PT. BPR Sinararta Sejahtera secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Sinararta Sejahtera.

PT. BPR Sinararta Sejahtera telah beroperasi kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan disepanjang tahun 2022 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank menjadi penyedia layanan perbankan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Kebumen, yang didukung oleh SDM yang handal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi para nasabah atau masyarakat luas.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	AGUS WIBOWO, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p>		
2.	Nama	:	HERY SUPRIYANTO, SE
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>c. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang.</p> <p>d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>e. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangandan Otoritas lain.</p> <p>f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.</p>		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
<p>a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.</p> <p>c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai</p>			



yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR Sinararta Sejahtera.
d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti.
f. Temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Penjelasan Lebih Lanjut :

NIHIL

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank di seluruh tingkatan/jenjang organisasi.</p> <p>c. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.</p> <p>e. Menyetujui Rencana Bisnis yang telah di susun oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis.</p> <p>f. Dewan komisaris wajib memberitahukan :</p> <p>a). Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan</p> <p>b). Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran atau keadaan atau perkiraan dimaksud.</p>			
Rekomendasi Kepada Direksi :			
<p>a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.</p> <p>c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR Sinararta Sejahtera.</p> <p>d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.</p> <p>f. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.</p> <p>g. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi bersifat signifikan.</p> <p>h. Melaksanakan operasional bisnis BPR sesuai Rencana Bisnis yang telah disusun setiap tahun.</p> <p>i. Memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan meningkatkan sistem pengendalian resiko secara melekat diseluruh aspek perkreditan.</p>			



Penjelasan Lebih Lanjut :
NIHIL

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
NIHIL	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	NIHIL	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-



	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS WIBOWO, SE	Rp0,00	0%
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS WIBOWO, SE	-	-	0%
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				



C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AGUS WIBOWO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AGUS WIBOWO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp686.400.000,00	2	Rp282.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp53.500.000,00	2	Rp22.500.000,00
3.	Tantiem	2	Rp114.400.000,00	2	Rp45.800.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp6.000.000,00	2	Rp6.000.000,00
Total			Rp860.300.000,00		Rp356.300.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2), Asuransi (2)	BPJS Kesehatan (2), Asuransi (2)
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (2)	BPJS Ketenagakerjaan (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
- Anggota Direksi masing-masing mendapatkan fasilitas kendaraan dinas untuk operasional. - Anggota Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas. - Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.89 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.54 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.72 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.09 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	14 Februari 2022	8	Pembahasan perkembangan Migrasi Ussi.
2.	28 Maret 2022	8	Pembahasan usulan Renovasi Kantor Cabang Kutoarjo.
3.	20 April 2022	7	Pembahasan kredit Restrukturisasi COVID-19 dan kredit NPL.
4.	24 Mei 2022	5	Pembahasan kegiatan operasional PT. BPR Sinararta Sejahtera.
5.	07 Juni 2022	9	Pembahasan evaluasi perkembangan persiapan pembukaan Kantor Cabang Kutoarjo.
6.	25 Juli 2022	6	Pembahasan NPL dan penyelesaiannya tahun 2022.
7.	11 Oktober 2022	2	Pembahasan evaluasi kinerja triwulan III tahun 2022
8.	28 November 2022	12	Pembahasan dan penetapan Rencana Bisnis BPR Sinararta Sejahtera tahun 2023.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi dari migrasi Ussi sampai dengan awal bulan Februari 2022 masih ada beberapa program belum support.- Pembahasan mengenai poin-poin yang akan direnovasi dan persiapan mengenai jaringan dan kelistrikan.- Evaluasi kredit restrukturisasi COVID-19 dan kredit NPL yang menjadi perhatian Kabag Marketing dan Remedial untuk memetakan dan melakukan assesment terhadap kredit yang			



sudah menunggak.

- Untuk kelancaran kegiatan operasional untuk ditingkatkan pelayanan yang exelent kepada nasabah kredit dan dana.
- Menindaklanjuti perkembangan persiapan pembukaan bukan Kantor Cabang Kutoarjo dan kendala yang dihadapi.
- Penyelesaian assesment terhadap kredit yang sudah tidak bisa diselesaikan untuk diusulkan Hapus Buku.
- Evaluasi kinerja triwulan III tahun 2022 yaitu mengoptimalkan dalam penyelesaian kredit NPL dan restrukturisasi COVID-19 dengan penjualan agunan, meningkatkan ekspansi kredit secara prudent, meningkatkan dana tabungan dan deposito dan fokus pada pencapaian yang maksimal terhadap target RBB tahun 2022.
- Pembahasan dan penetapan Rencana Bisnis BPR Sinararta Sejahtera tahun 2023.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	7	0	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

- Kehadiran anggota Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun yaitu Bapak Yohanes Sucipto Dadi, SH. MM frekuensi kehadiran 102 (seratus dua) kali dan Bapak Ir. Subagyo Nugroho frekuensi kehadiran 45 (empat puluh lima) kali.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian rapat melalui tatap muka.



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
NIHIL								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
NIHIL		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							



Penjelasan Lebih Lanjut :
NIHIL

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17 Januari 2022	Sosial	Sumbangan Partisipasi Kegiatan FKUI FBSI	Panitia	Rp100.000,00
2.	16 Februari 2022	Sosial	Sumbangan Bakti Sosial FSPTI	Panitia	Rp100.000,00
3.	22 Februari 2022	Sosial	Sumbangan Kegiatan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut	Panitia	Rp125.000,00
4.	04 Maret 2022	Sosial	Sumbangan Pembangunan Yayasan Era	Panitia	Rp200.000,00
5.	08 Juni 2022	Sosial	Sumbangan Yayasan Al Hidayah	Panitia	Rp150.000,00
6.	04 Agustus 2022	Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 77 Desa Wonokriyo	Panitia	Rp250.000,00
7.	13 Oktober 2022	Sosial	Sumbangan Kegiatan PORTI (Perhimpunan Olahraga Tunanetra Indonesia) Kebumen	Panitia	Rp500.000,00
8.	10 November 2022	Sosial	Sumbangan Yatim Piatu Banjarsari	Panitia	Rp200.000,00
9.	01 Desember 2022	Sosial	Sumbangan Peduli Gempa Cianjur	PERBARINDO	Rp1.000.000,00
10.	13 Desember 2022	Sosial	Partisipasi Perayaan Syukuran 40 Thn Imamat Rd Christophorus Kris Wasito	Panitia	Rp3.000.000,00
11.	16 Desember 2022	Sosial	Sumbangan Renovasi Masjid Nurul Muttaqin Gombong.	Panitia	Rp750.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
NIHIL



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Sinararta Sejahtera
Alamat	: JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
Nomor Telepon	: (0287) 473388
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp7.992.395.000,00
Total Aset	: Rp87.080.391.000,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Sinararta Sejahtera Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.71	0.342
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.34	0.351
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.21	0.221
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.10	0.210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.89	0.189
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			2.000
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.71)

Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang dan salah satunya Direksi Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.34)

Jumlah anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang dikarenakan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak diperpanjang masa jabatannya. Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Anggota Dewan komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan sudah ada Rapat Dewan Komisaris yang memberikan rekomendasi kepada Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR dalam menangani Benturan Kepentingan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan tidak merugikan BPR atau melanggar peraturan yang berlaku.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.21)

BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen yang bertanggungjawab kepada Direktur YMFK, sudah memiliki pedoman dan kebijakan fungsi kepatuhan dan membuat laporan tahunan kepada OJK.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

BPR sudah memiliki pedoman dan kebijakan audit intern dan sudah ada Pejabat Eksekutif audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional BPR serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Menyusun laporan tahunan kepada OJK.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah menunjuk KAP untuk melakukan audit laporan keuangan BPR sesuai ketentuan OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.89)

BPR sudah menerapkan Manajemen Risiko cukup baik sesuai dengan ketentuan OJK. BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan Limit Risiko. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.



9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR tidak melanggar BMPK, untuk mencegah terjadinya BMPK salah satunya adalah dengan membandingkan realisasi kredit dan penempatan dana dengan Modal inti, serta dipantau rasio keuangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR. RBB menggambarkan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. RBB BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku, transparansi, ditandatangani Direksi dan disampaikan ke OJK tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Governance Structure adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance Structure bahwa untuk mendukung operasional BPR Sinararta Sejahtera masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Untuk Faktor Positif Aspek Governance Process yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif Aspek Governance Process adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang dan mengkinikan Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terjadi saat ini.

Dari sisi Faktor Positif Aspek Governance Output bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan pernodalan masih cukup memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance Output yaitu selama tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Namun kedepannya untuk Faktor Positif dan Faktor Negatif Aspek Governance dapat terlaksana lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PT. BPR Sinararta Sejahtera
JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
Telepon: (0287) 473388
Website: www.bprsas.com. Email: sinararta@yahoo.com

Gombong, 30 Januari 2023

PT. BPR Sinararta Sejahtera

Menyetujui,

HERY SUPRIYANTO, SE
DIREKTUR YMF KEPATUHAN DAN MR

YOHANES SUCIPTO DADI, SH. MM
KOMISARIS UTAMA